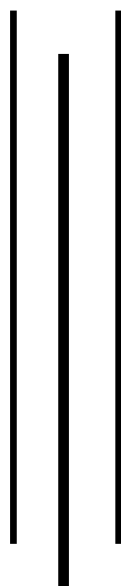




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA (LKjIP) TAHUN 2025



BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

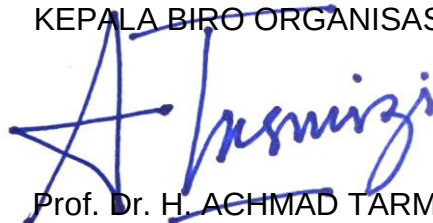
Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Organisasi, maka Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan kinerja Biro Organisasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Biro Organisasi yang terukur terhadap Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Untuk itu kami menerima kritik dan saran demi optimalisasi yang berkesinambungan peran kelembagaan dan pelaksana dalam lingkungan lembaga, guna meningkatkan penyempurnaan kinerja kedepannya.

Palembang, Maret 2026

KEPALA BIRO ORGANISASI,



Prof. Dr. H. ACHMAD TARMIZI, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196606091995121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Hasil analisa atas pelaksanaan kinerja tahun 2025 pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan berupaya menunjukkan menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan tata kelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangan nya.

Salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance*. Akuntabilitas Kinerja harus memuat sekurang-kurangnya dalam tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas dalam suatu perencanaan strategis untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran indikator yang terukur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi	50 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas	Nilai Laporan Akuntabilitas terhadap SAKIP Komponen Pelaporan (15)	12
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pelayanan Publik	4,50
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31 (A)
4	Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan	3 Perangkat Daerah
		Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	90%
		Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel.	97%

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS	10
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan harapan bagi pemerintahan untuk mencapai cita-cita setiap bangsa yang berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu diperlukan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai aturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum dan masyarakat;
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019–2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan tahun 2025.

1.2. Gambaran Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Biro Organisasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana.

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Untuk dapat menjalankan tugasnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro, dan bertanggung jawab kepada Asisten III Bidang Administrasi dan Umum. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pada Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka, Biro Administrasi pembangunan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

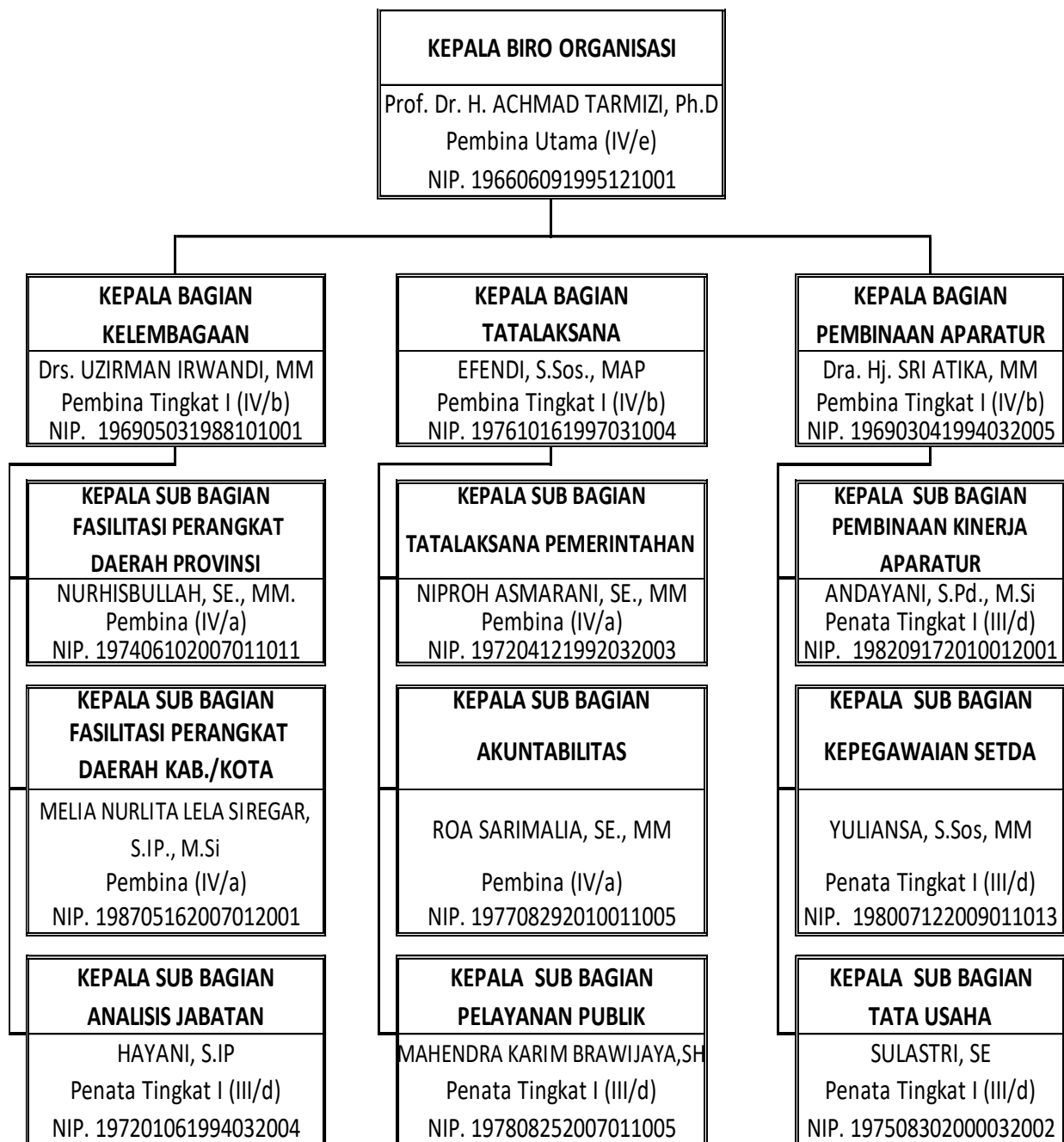
1. Kepala Biro
2. Bagian Tatalaksana, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu;
 - a. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - b. Subbagian Akuntabilitas; dan
 - c. Subbagian Tatalaksana Pelayanan Publik.
3. Bagian Kelembagaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - a. Subbagian Fasilitasi Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Subbagian Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Subbagian Analisis Jabatan.
4. Bagian Pembinaan Aparatur Setda, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - a. Subbagian Pembinaan Kinerja Aparatur;
 - b. Subbagian Kepegawaian Setda, dan
 - c. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Biro Organisasi

Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Selatan



1.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Biro Organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Biro Organisasi

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3		4	5
1	Kepala Biro	Pembina Utama (IV/e)	= 1 Orang	S.3 = 1 Orang	Laki-Laki
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 2 Orang	S.2 = 2 Orang	Laki-Laki
3			= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
5			= 3 Orang	S.2 = 3 Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
7			= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Perempuan
8			= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
9			= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Perempuan
10	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1 Orang	S.2 = 1 Orang	Laki-Laki
11		Pembina (IV/a)	= 2 Orang	S.2 = 2 Orang	Perempuan
12		Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
13		Penata Muda Tk. I(III/b)	= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Perempuan
14		Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Laki-Laki
15	Fasilitator Pemerintahan	Penata Muda (III/a)	= 2 Orang	S.1 = 2 Orang	Laki-Laki
16	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	= 1 Orang	S.1 = 1 Orang	Perempuan
Jumlah			23 Orang	23 Orang	
17	PPPK	Penata Layanan Operasional (IX)	= 3 Orang	S.1 = 3 Orang	Laki-Laki
18			= 8 Orang	S.1 = 8 Orang	Perempuan
19		Pengelola Layanan Operasional (VII)	= 1 Orang	D.3 = 1 Orang	Perempuan
20		Operator Layanan Operasional (V)	= 1 Orang	SMU = 1 Orang	Laki-Laki
21		Pengadministrasi Perkantoran (V)	= 4 Orang	SMU = 4 Orang	Laki-Laki
22			= 6 Orang	SMU = 6 Orang	Perempuan
Jumlah			23 Orang	23 Orang	
Jumlah Total			46 Orang	46 Orang	

1.2.3. Arah Kebijakan dan Peran Strategis

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Biro Organisasi Tahun 2025

Tabel. 1.2
Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Biro Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penyederhanaan Struktur Organisasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Optimalisasi Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Deregulasi Kebijakan, Digitalisasi Birokrasi (E-Government), Penyetaraan Jabatan dan Budaya Kerja Ber-AKHLAK	- Penataan Organisasi berbasis kinerja dan evaluasi kelembagaan secara berkala agar tetap relevan dengan kedudukan daerah/pusat. - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan analisis. - Bisnis yang mendukung system kerja hybrid dan kolaboratif. - Fasilitasi kompetensi inovasi pelayanan public dan pemantauan berkala terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Peningkatan zona integritas dan peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi.

1.2.4. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, arah kebijakan dan peran strategis.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat Biro Organisasi, visi dan misi, tujuan, perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III : Akuntabilitas

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Biro Organisasi pemerintah provinsi sumatera selatan.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI BIRO ORGANISASI

2.1. VISI DAN MISI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keselarasan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 terkait dalam Misi ke-3 yaitu:

MISI 3

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.”

TUJUAN

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”

SASARAN

“Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas).”

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan diselaraskan dengan Visi Gubernur Sumatera dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023, maka Visi Biro Organisasi adalah “Terwujudnya Pelayanan Administratif dalam Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Penataan Organisasi yang

diselaraskan dengan Program Sumsel Maju untuk semua Tahun Anggaran 2024-2026”.

2. Misi

Terwujudnya Visi yang dikemukakan diatas merupakan hal yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh segenap Aparat Birokrasi dalam Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel.

Sejalan dengan Visi, maka Misi Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. Penyiapan pemantauan dan valuasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Umum berkaitan dengan tugasnya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rantang waktu satu tahun tertentu untuk mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan juga pemberian sanksi.

Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025, Penetapan Kinerja tahun 2025 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi	50 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas	Nilai Laporan Akuntabilitas terhadap SAKIP Komponen Pelaporan (15)	12
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pelayanan Publik	4,50
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31 (A)
4	Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan	3 Perangkat Daerah
		Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	90%
		Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel.	97%

BAB III AKUNTABILITAS

3.1. Capaian Kinerja Biro Organisasi

Indikator kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian kinerja secara fisik dan capaian kinerja secara keuangan sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Secara Fisik

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1	Jumlah Fasilitas Pembinaan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	Proses Penilaian Kementerian PAN-RB	-
2.1	Nilai Laporan Akuntabilitas terhadap SAKIP Komponen Pelaporan (15)	Nilai	12	10,23	85,25%
3.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,50	Proses Pengumpulan Data untuk Lokus Evaluasi	-
3.2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	88,31 (A)	Penilaian <i>on-going</i> di akhir tahun	
4.1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan	Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%
4.2	Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Persen	90%	90%	100%
4.3	Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel.	Persen	97%	97%	100%

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Secara Keuangan

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)
1	2	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.129.078.800,-	1.068.937.988,-	94,67
2.	Program Penataan Organisasi	888.884.600,-	854.361.116,-	96,63
Jumlah		2.017.963.400,-	1.923.299.104,-	95,31

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.1	Jumlah Fasilitas Pembinaan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	Proses Penilaian Kementerian PAN-RB	-
2.1	Nilai Laporan Akuntabilitas terhadap SAKIP Komponen Pelaporan (15)	Nilai	12	10,23	85,25%
3.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,50	Proses Pengumpulan Data untuk Lokus Evaluasi	-
3.2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	88,31 (A)	Penilaian <i>on-going</i> di akhir tahun	
4.1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan	Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%
4.2	Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Persen	90%	90%	100%
4.3	Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel.	Persen	97%	97%	100%

3.1.1 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan Biro Organisasi Target dan Rencana.

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2025 ditargetkan 90%, terealisasi keuangan 95,31%, dan fisik 100% atau realisasi sebesar 100% pada Biro Organisasi.

Grafik 3.1
Persentase Penyerapan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Biro Organisasi Target dan Rencana Tahun 2025

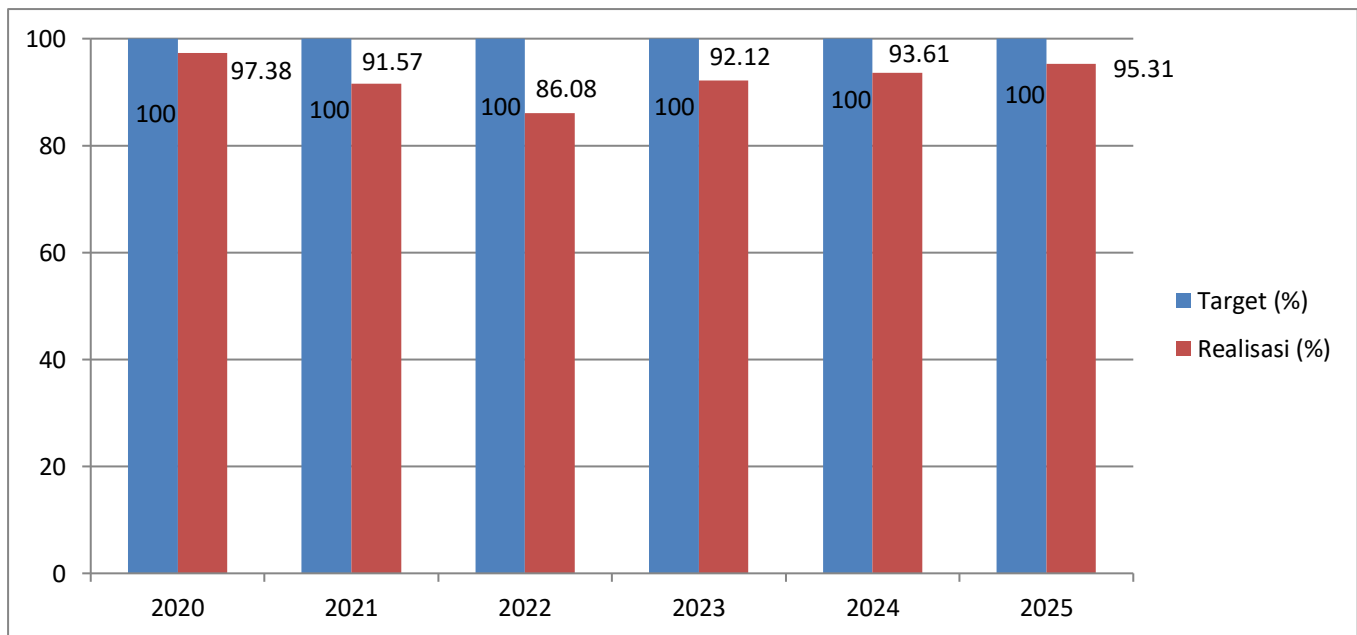


Tabel. 3.5
Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 - Tahun 2025

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 - Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Kegiatan Tahun 2020	%	95	97,38%	100 %
2	Kegiatan Tahun 2021	%	95	91,57%	100 %
3	Kegiatan Tahun 2022	%	95	86,08%	100 %
4	Kegiatan Tahun 2023	%	95	92,12%	100 %
5	Kegiatan Tahun 2024	%	95	93,61%	100 %
6	Kegiatan Tahun 2025	%	95	95,31%	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat Perbandingan Capaian Kegiatan dari Tahun 2020 - Tahun 2025 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program / kegiatan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Biro Organisasi.

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kegiatan Tahun 2020 – Tahun 2025



Dari diagram diatas persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2022 s.d tahun 2024 terlaksana dengan maksimal dengan Capaian indikator Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi dengan rincian 2 (dua) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

I. Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Sub-Kegiatan Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

13. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

14. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
15. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

VIII. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

16. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi
17. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
18. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

IX. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

19. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
20. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
21. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
22. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
23. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

Tahun 2025, untuk program/kegiatan Biro Organisasi persentase penyerapan Realisasi Keuangan sebesar 95,31% dan Realisasi Fisik sebesar 100%.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran sebesar Rp. 2.017.963.400,- (dua milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan Realisasi Keuangan pada sebesar Rp. 1.923.299.104,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) dengan realisasi keuangan (95,3%) dan untuk realisasi fisik mencapai (100%), bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER-31 DESEMBER 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			SILPA	Tertimbang Fisik	Ket./ Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik			
						(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,129,078,800		44.03%	100.00%	1,068,937,988	94.67%	100%	60,140,812	44.03%	-
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,500,000		0.80%	100.00%	18,280,700	89.17%	100%	2,219,300	0.80%	-
1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,500,000	Palembang	0.80%	100.00%	18,280,700	89.17%	100%	2,219,300	0.80%	-
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	170,000,000		6.63%	100.00%	162,080,000	95.34%	100%	7,920,000	6.63%	-
2	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170,000,000	Palembang	6.63%	100.00%	162,080,000	95.34%	100%	7,920,000	6.63%	-
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,333,200		5.08%	100.00%	124,033,717	95.17%	100%	6,299,483	5.08%	-
3	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	91,373,200	Palembang	3.56%	100.00%	90,719,897	99.29%	100%	653,303	3.56%	-
4	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,960,000	Palembang	1.21%	100.00%	28,053,820	90.61%	100%	2,906,180	1.21%	-
5	Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Palembang	0.00%	100.00%	0	0.00%	0%	0	0.00%	-
6	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Palembang	0.00%	100.00%	0	0.00%	0%	0	0.00%	-
7	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,000,000	Palembang	0.31%	100.00%	5,260,000	65.75%	100%	2,740,000	0.31%	-
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	344,700,000		13.44%	100.00%	328,813,071	95.39%	100%	15,886,929	13.44%	-
8	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,000,000	Palembang	3.55%	100.00%	84,653,626	93.03%	100%	6,346,374	3.55%	-
9	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226,500,000	Palembang	8.83%	100.00%	218,502,195	96.47%	100%	7,997,805	8.83%	-
10	Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	27,200,000	Palembang	1.06%	100.00%	25,657,250	94.33%	100%	1,542,750	1.06%	-
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,000,000		3.12%	100.00%	79,642,500	99.55%	100%	357,500	3.12%	-
11	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Palembang	0.00%	100.00%	0	0.00%	0%	0	0.00%	-
12	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000	Palembang	3.12%	100.00%	79,642,500	99.55%	100%	357,500	3.12%	-
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,045,600		8.00%	100.00%	178,684,000	87.14%	100%	26,361,600	8.00%	-
13	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,045,600	Palembang	8.00%	100.00%	178,684,000	87.14%	100%	26,361,600	8.00%	-

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			SILPA	Tertimbang Fisik	Ket./ Ken- dala/ Ham- batan
						Keuangan		Fisik			
						(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,500,000		6.96%	100.00%	177,404,000	99.39%	100%	1,096,000	6.96%	-
14	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	120,000,000	Palembang	4.68%	100.00%	119,076,000	99.23%	100%	924,000	4.68%	-
15	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58,500,000	Palembang	2.28%	100.00%	58,328,000	99.71%	100%	172,000	2.28%	-
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	888,884,600		34.66%	100.00%	854,361,116	96.63%	100%	34,523,484	34.66%	-
VIII.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	302,460,000		11.79%	100.00%	281,067,078	95.45%	100%	21,392,922	11.79%	-
16	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	75,560,000	Palembang	2.95%	100.00%	75,331,076	99.70%	100%	228,924	2.95%	-
17	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	66,900,000	Palembang/ Kab./Kota	2.61%	100.00%	66,774,494	99.81%	100%	125,506	2.61%	-
18	Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	160,000,000	Palembang	6.24%	100.00%	138,961,508	86.85%	100%	21,038,492	6.24%	-
IX.	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	586,424,600		22.87%	100.00%	573,294,038	97.82%	100%	13,130,562	22.87%	-
19	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	135,070,000	Palembang	5.27%	100.00%	133,912,058	99.14%	100%	1,157,942	5.27%	-
20	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	164,019,600	Palembang	6.40%	100.00%	157,698,610	96.15%	100%	6,320,990	6.40%	-
21	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	77,860,000	Palembang	3.04%	100.00%	77,075,900	98.99%	100%	784,100	3.04%	-
22	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	123,475,000	Palembang	4.81%	100.00%	122,171,627	98.94%	100%	1,303,373	4.81%	-
23	Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	86,000,000	Palembang/ Kab./Kota	3.35%	100.00%	82,435,843	95.86%	100%	3,564,157	3.35%	-
	Total	2,017,963,400		78.69%	100.00%	1,904,300,119	94,36%	100%	113,663,281	78.69%	-

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Biro Organisasi mempunyai harapan kedepan dalam rangka memperbaiki Penyusunan Laporan ini agar dapat mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi.

Adapun beberapa langkah akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

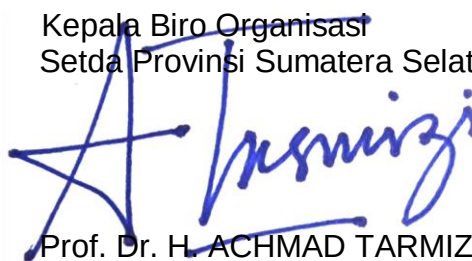
1. Meningkatkan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.
2. Meningkatkan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.
3. Meningkatkan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.
4. Meningkatkan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Semoga Laporan ini dapat digunakan sebagai acuan Penyusunan Perencanaan Laporan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palermbang, Maret 2026

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Sumatera Selatan,



Prof. Dr. H. ACHMAD TARMIZI, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196606091995121001